

Skripsi
***SAO MACCA* DI KABUPATEN SOPPENG**
(Studi Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih)

ANDI MUHRANI

NomorStambuk : 105640186013



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

***SAO MACCA* DI KABUPATEN SOPPENG**
(Studi Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan di ajukan oleh

ANDI MUHRANI

Nomor Stambuk: 105640186013

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Sao Macca* Di Kabupaten Soppeng (Studi Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih)

Nama Mahasiswa : Andi Muhrani

Nomor Stambuk : 105640186013

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I



Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si

Pembimbing II



Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan

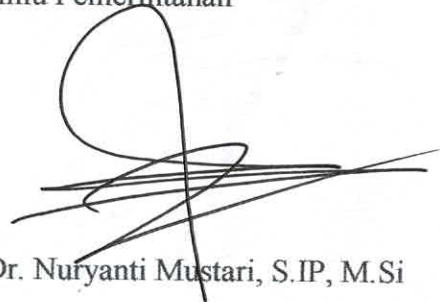
Fisipol Unismuh Makassar



Hj. Inyami Malik, S.Sos, M, Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor. 1342/FSP/A.I-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada kamis,30 agustus 2018.

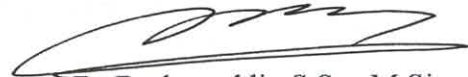
TIM PENILAI

Ketua



Dr.HJ.Ihyani Malik,S.Sos,M.Si

Sekretaris



Dr.Burhanuddin,S.Sos,M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)
2. Dra.Hj.Muhajirah Hasanuddin, M.Si
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos .M.Si
4. Rudi Hardi, S.Sos. M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : AndiMuhrani

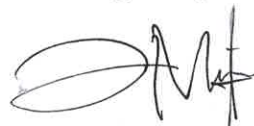
Nomor stambuk : 10564 01860 13

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 13 April 2018

Yang Menyatakan,



AndiMuhrani

ABSTRAK

ANDI MUHRANI, 2018. *Sao Macca Di Kabupaten Soppeng (Studi Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih)* dibimbing oleh Hj. Muhajirah Hasanuddin dan Samsir Rahim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih, jenis kegiatan yang ada pada rumah pintar pemilu dan hambatan-hambatan yang dihadapi rumah pintar pemilu.

Jenis penelitian adalah kualitatif dan tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan informan 7 orang yang dipilih sesuai *purposive*. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian adalah didapatkannya gambaran tentang rumah pintar pemilu “Sao Macca”. Peranan rumah pintar pemilu adalah wadah bagi pemilih, tempat pembelajaran pemilih pemula dan mengedukasi pemilih. Jenis kegiatan meliputi pemutaran film-film kepemiluan (audio visual), berpartisipasi pada pameran Expo, diskusi politik, membuat kelas pemilu. Hambatan yang dihadapi yaitu: Rendahnya minat masyarakat untuk mengetahui adanya rumah pintar pemilu, sarana dan prasarana masih terbatas, pengelola rumah pintar pemilu masih terbatas, belum ada pelatihan tentang mengelola rumah pintar pemilu.

Kata Kunci: Peran, Rumah Pintar Pemilu, Partisipasi Politik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang menderang.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rasa hormat dan penuh cinta, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis Ayah “Alm. A. Chaeruddin” dan Ibu “A.Patappari”, yang selalu membantu secara moril maupun materil dan mendukung dengan doa dan harapan agar penulis dapat menyelesaikan S1 Ilmu Pemerintahan.

Adapun judul peneliti yang diangkat oleh penulis yaitu “ *Sao Macca* Di Kabupaten Soppeng (Studi Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih).

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, mungkin masih banyak kekurangan atau kelemahan baik dari segi penyusunan maupun dari pandangan pengetahuan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, pendapat atau kritik yang bersifat konstruktif dari semua, demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak kesulitan yang penulis hadapi, namun atas bantuan bimbingan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat di dalamnya sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Untuk itu perkenankanlah penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu “Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si” selaku Pembimbing I dan Ayahanda “Dr. H. Samsir Rahim” selaku Pembimbing II, dengan penuh kesabaran untuk memberikan perhatian, bimbingan dan arahan kepada penulis.

Tak lupa pula penulis ucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr, H. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan dan seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ketua Komisi Pemelihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng beserta seluruh stafnya terutama kepada Ibu Murtina S.Pt, M.Si dan Ibu Darmawati Alimuddin yang telah membantu selama penelitian.

6. Kepada saudara (i) ku Alim, Uppi, Edi, Aweng, Wiwi, Cece yang tercinta terimah kasih atas motivasi dan doanya dan warna dalam hidupku
7. Kepada sahabat-sahabatku Rahmawati, Hasnia, Irma Mardatillah, Nurul Izmy terimah kasih atas canda tawa, suka duka dan bersedia menjadi teman terindahku.
8. Rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 terkhusus Kelas D
9. Seluruh Keluarga yang telah mmemberikan dukungan, semangat dan nasehat bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan studinya.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah pada hamba-Nya, Amin.

Makassar, 13 April 2018

ANDI MUHRANI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Persetujuan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Partisipasi Politik	7
B. Teori Peran	19
C. Rumah Pintar Pemilu	23
D. Kerangka Pikir	25
E. Fokus Penelitian	26
F. Deskripsi Fokus Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	33
G. Pengabsahan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian Penelitian	36
B. Gambaran Umum Rumah Pintar Pemilu.....	40
C. Data Hasil Pemilu Kab.Soppeng tahun 2015 dan 2018.....	45
D. Peran Rumah Pintar Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Soppeng	46
E. Jenis Kegiatan Rumah Pintar Pemilu	54
F. Hambatan-Hambatan Rumah Pintar Pemilu	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana pemenuhan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang diperoleh pada Pemilu diharapkan mampu menjadi pemerintahan yang mendapat pembenaran yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi pilar tegaknya demokrasi, dimana rakyat turun langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk suatu periode ke depan.

Berkaitan dengan demokrasi, partisipasi politik berdampak akan pembenaran masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Setiap rakyat memiliki pilihan dan kebutuhan masing-masing guna menetapkan pilihan mereka pada pemilu. Bisa dikatakan bahwa nasib pemimpin yang terpilih dalam suatu Pemilu berada pada pilihan masyarakat sebagai pemilih.

Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat pada Pemilu dapat bisa dilihat sebagai pengendalian masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Pengendalian yang diberikan bermacam-macam tergantung pada tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain seperti hakikat dari demokrasi, partisipasi politik seperti juga berhubungan erat dengan pemuasan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adanya kebebasan bagi setiap warga untuk mengutarakan pemikiran dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan

mengutarakan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Tia Subekti, 2014).

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu ditunjang oleh tingkat pemahaman politik warga negara yang bersangkutan. Pemahaman politik ini gambaran atas seberapa besar partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam proses Pemilu, serta menyodorkan harapan kepada setiap warga negara agar dapat memberikan suara dukungannya pada proses penetapan pemerintah baik dieksekutif maupun legislatif sesebagai pelaksana kebijakan. Pada intinya partisipasi politik masyarakat pada Pemilu bisa sebagai sarana untuk masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan memberikan amanahnya terhadap mereka yang layak dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan.

Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Rendahnya partisipasi politik dasarnya muncul karena sikap acuh tak acuh terhadap aktifitas dan kegiatan politik, yang mana masyarakat lebih mementingkan untuk menjalankan aktifitas harian mereka seperti bekerja, berolahraga, klub sosial, bertamasya, dan lain-lain, yang dianggap bisa memberikan suatu kontribusi yang lebih nyata dibandingkan dengan harus berpartisipasi dalam politik.

Cita-cita menuju masyarakat yang paham akan proses dan pelaksanaan Pemilu Indonesia boleh jadi masih sangat jauh untuk dapat diaplikasikan kepada masyarakat. Masih jauh bukan berarti tidak akan dapat diaplikasikan sama sekali.

Tentunya sukses dan berhasilnya mencapai cita-cita bukan dicapai secara instan. Baiknya untuk mencapai cita-cita tersebut melalui proses yang berkesinambungan, bertahap dan didukung oleh sarana dan prasarana dari berbagai pihak.

Karakteristik masyarakat yang bermacam-macam tentu tidak bisa disamakan pendekatannya. Memahami proses pelaksanaan Pemilu bagi pemilih yang didominasi oleh segmen ibu-ibu, tentu berbeda pendekatannya dengan para pemilih pemula seperti siswi/siswa sekolah tingkat menengah. Penyampainnya pun harus dikemas sedemikian rupa agar dapat menarik 'keingintahuan' para pemilih terhadap tahap-tahap pelaksanaan Pemilu.

Masyarakat pada awal pelaksanaan Pemilu 1955 tentunya sudah berbeda dengan masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Pilkada 2015-. Pada awal kemerdekaan, Pemilu pertama yang diselenggarakan membuat masyarakat antusias akan suksesnya pelaksanaan awal Pemilu.

Untuk menjamin pelaksanaan demokrasi pertama tersebut, masyarakat menuntut dan berharap agar diadakan penyelenggaraan Pemilu yang adil. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk memilih calon pemimpin ditengah hidup yang serba kekurangan.

Berbeda dengan masyarakat saat ini, yang telah disuguhi dengan berbagai akses informasi dan berkecukupan hidup bagi sebagian besar orang. Perlunya memahami proses pelaksanaan Pemilu di masyarakat sudah tidak dibatasi lagi seperti dahulu. Aturan keterbukaan informasi telah membuka akses bagi 'keingintahuan' masyarakat terhadap proses Pemilu.

Pemilu itu sendiri tidak hanya proses sekedar untuk *mencoblos* atau *mencontreng* belaka. Dibalik itu ada tanggung jawab bersama untuk benar-benar memilih pemimpin yang baik, bebas *money politik*, bebas korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengawal proses Pemilu agar berjalan aman, adil, jujur, dan tanpa ada kecurangan.

Tentunya semua itu tidak terlepas dari peran penyelenggara Pemilu, *stakeholder* terkait dan dukungan masyarakat. Selama ini masyarakat menilai sosialisasi yang kurang diakibatkan oleh peran Komisi Pemilihan Umum yang belum maksimal. Padahal sebagai penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bukan merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab akan suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Dukungan dari berbagai pihak juga di butuhkan agar dapat mengawal penyelenggaraan Pemilu yang adil dan tanpa kecurangan.

Kendati begitu, Komisi Pemilihan Umum terus mengupayakan agar masyarakat paham dan mengerti jalannya proses Pemilu. Salah satu upaya yang gencar untuk dilakukan dalam sosialisasi yaitu “Rumah Pintar Pemilu” yang digagas Komisi Pemilihan Umum.

Di Kabupaten Soppeng, rumah pintar Pemilu yang diberi nama “*Sao Macca*” merupakan program Komisi Pemilihan Umum yang diluncurkan dengan tujuan rumah pintar pemilu tersebut secara umum agar meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu serta dapat menjadi pusat informasi kePemiluan itu sendiri. Secara khusus, rumah pintar Pemilu ini dapat membimbing masyarakat

terkait pentingnya Pemilu dan demokrasi. Pendidikan pemilih yang dilakukan harus disesuaikan dan mencakup semua segmen pemilih. Diantaranya dengan mempublikasikan nilai dasar Pemilu dan demokrasi bagi segmen pemilih pemula hingga menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi bagi semua segmen.

Oleh karena itu disini penulis ingin melihat peran serta rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul *Sao Macca Di Kabupaten Soppeng (Studi Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan masalah oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana peran serta rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Soppeng?
2. Apa jenis kegiatan yang diselenggarakan di rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Soppeng?
3. Apa hambatan yang dihadapi rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran serta rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Soppeng.

2. Untuk mengetahui jenis kegiatan yang diselenggarakan di rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Soppeng.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memberikan manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperoleh data tentang peran serta rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Soppeng.
 - b. Sebagai referensi atau penelitian yang lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pengelola Rumah Pintar Pemilu, sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Soppeng, guna perbaikan strategi dan komunikasi kepada masyarakat bagi penyelenggara pemilu yang akan datang.
 - b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam memperluas cakrawala berfikir dan keabsahan keilmuan bagi penulis.
 - c. Bagi masyarakat, sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang program rumah pintar pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi jadi langkah utama dalam mengawali reformasi 1998.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang berarti bagian dan *capere* yang artinya mengambil andil dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila disatukan berarti “mengambil bagian”. Pada bahasa Inggris, *partisipate* atau *participation* ialah mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi adaalah mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Partisipasi masyarakat ialah berpartisipasinya seluruh anggota masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Partisipasi masyarakat di lihat dari segi kesehatan ialah keikutertaan semua anggota masyarakat terhadap menyelesaikan masalah kesehatan mereka sendiri. Masyarakat sendirilah yang aktif melihat, merancang, menjalankan, dan menilai program-program kesehatan masyarakatnya. Lembaga kesehatan cuma sekedar menyemangati dan membimbingnya.

Soetomo (2008), menyatakan pembangunan pada intinya ialah proses perubahan, dan merupakan wujud perubahan yang diharapkan ialah perubahan perilaku. Partisipasi masyarakat yang berkembang baik dari kualitatif maupun kuantitatif melahirkan wujud dan perubahan sikap dan perilaku tersebut.

Selanjutnya Slamet (2003: 8) mengatakan, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan ialah bentuk ikut sertanya masyarakat pada pembangunan, ikut pada program pembangunan, dan ikut serta menggunakan dan merasakan hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan pengertian partisipasi, jadi partisipasi pada pembangunan dapat dikelompokkan menjadi lima jenis:

- a. Ikut membantu proses pembangunan, mendapat imbalan dan ikut merasakan hasilnya.
- b. Ikut membantu *input* dan merasakan hasilnya.
- c. Ikut membantu *input* dan memperoleh upah minus ikut merasakan hasil pembangunan.
- d. Merasakan/menggunakan hasil pembangunan tanpa ikut membantu.
- e. Membantu tanpa memperoleh upah dan menerima hasilnya.

Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat terhadap proses pengenalan masalah dan kemampuan yang ada dimasyarakat, penentuan dan pemungutan keputusan terkait opsi jalan keluar guna menyelesaikan masalah, penerapan cara menyelesaikan masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam proses menilai perubahan yang terjadi.

Gaventa dan Valderama dalam Arsito (2004), mengemukakan terdapat tiga tradisi konsep partisipasi jika dikaitkan terhadap pembangunan yang absolut yaitu:

- a. Partisipasi Politik, *political participation* lebih condong terhadap “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” pada institusi pemerintahan dibanding partisipasi aktif terhadap proses-proses pemerintahan sendiri.
- b. Partisipasi Sosial, *social participation* partisipasi dikatakan seperti keikutsertaan masyarakat terutama yang dilihat seperti beneficiary maupun bagian di luar proses pembangunan terhadap konsultasi maupun penentuan keputusan dalam semua tahap peredaran proyek pembangunan dari nilai kebutuhan sampai penilaian, implementasi, peninjauan dan penilaian. Partisipasi sosial sejatinya dilaksanakan guna menguatkan proses pembelajaran dan mobolisasi sosial. Maksud utama pada proses partisipasi sosial kenyataanya bukan terhadap kebijakan publik itu sendiri melainkan keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pengajaran dan mobilisasi sosial.
- c. Partisipasi Warga, *citizen participation/citizenship* memusatkan pada partisipasi langsung warga terhadap pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengubah konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian tarhadap ‘penerima derma’ atau ‘kaum tersisih’ menuju ke kepedulian dengan berbagai bentuk keterlibatan warga dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan di beberapa

gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka”. Hingga berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang lebih condong terhadap agenda penentuan kebijakan publik sebagai wahana pembelajaran.

2. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah salah satu aspek terpenting dari demokrasi. Pemikiran yang mendasari demokrasi (partisipasi) ialah orang yang paling mengerti tentang apa yang terbaik bagi dirinya yaitu orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang ditentukan dan dijalankan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara jadi masyarakat berhak turut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya pada keikutsertaan warga negara terhadap memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua yaitu: mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menetapkan pembuatan dan implementasi keputusan politik.

Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisil (2007:150) menyatakan definisi singkat perihal partisipasi politik sebagai bentuk keterlibatan warga negara biasa dalam menetapkan segala keputusan yang menyangkut maupun memengaruhi hidupnya.

Budiarjo (2008:367) mengatakan bahwa partisipasi politik secara luas bisa dikatakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk turut aktif serta terhadap kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public*

policy). Kegiatan ini seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan, menjalin hubungan (*contacting*) maupun *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai maupun salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi dasarnya dianggap lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan pahami masalah politik dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, partisipasi rendah pada dasarnya dianggap kurang baik, karena dapat diartikan bahwa banyak warga tidak menaruh minat terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008:369).

Hungtinton dan Nelson (1994 :16) menyebutkan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman (*privatecitizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Sebagai definisi umum dari beberapa pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik ialah kegiatan seseorang maupun kelompok orang guna ikut serta aktif terhadap kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan, menjalin hubungan (*contracting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Menjadi bagian partai maupun salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa pandangan ahli terkait pengertian partisipasi politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik ialah keterlibatan warga negara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan maupun menjalankan kebijakan umum pemerintah.

3. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Ada beberapa macam bentuk partisipasi yang menurut para ahli. Rush dan Althoff (2003: 122) menguraikan bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut:

- a. Menempati jabatan politik atau administratif.
- b. Mencari jabatan politik atau administratif.
- c. Anggota aktif pada suatu organisasi politik.
- d. Keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik.
- e. Anggota aktif pada suatu organisasi semu politik.
- f. Keanggotaan pasif dalam suatu organisasi semu politik.
- g. Berpartisipasi pada rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
- h. Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik.
- i. Pemberian suara.

Almond dalam Mas'ood dan Andrews (2000: 47) membedakan partisipasi politik menjadi dua jenis, yaitu konvensional dan non konvensional.

- a. Konvensional, yaitu
 - 1) Pemberian suara atau voting

Wujud partisipasi politik yang paling lazim terjadi di negara-negara demokratis yaitu politik memberi suara pada pemilihan umum. Dalam hal ini, memberikan suara pada pemilihan umum berarti memberikan dukungan terhadap atau kandidat dan menolak partai dan kandidat lain yang sedang berkompetisi. Ketika pilihan maupun suara yang diberikan pada pemilihan sekarang berubah dari pilihan sebelumnya, berarti pemilih memberikan dukungan pada sistem yang sedang berlangsung, serta menginginkan perubahan demokratis dan elegan.

2) Diskusi politik

Aktif mencari informasi mengenai berbagai persoalan politik, menulis surat pembaca yang berisi penilaian-penilaian atau saran-saran mengenai berbagai persoalan politik untuk dipublikasikan di surat kabar atau artikel, mendatangi pejabat lokal untuk menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan, dan menulis petisi untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan.

3) Kegiatan kampanye

Bentuk yang paling aktif adalah ikut berkompetisi dengan menjadi kandidat, karena keikutsertaannya dalam proses politik nyaris sempurna karena kandidat mesti mengeluarkan uang untuk pencalonan dan kampanye, mesti terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan kampanye guna mempengaruhi orang lain supaya memberikan dukungan, melakukan lobi-lobi untuk mencapai sarana-sarana tertentu, termasuk melobi penyandang dana serta kelompok-kelompok maupun organisasi-organisasi tertentu.

b. Non Konvensional:

- 1) Pengajuan petisi.
- 2) Berdemonstrasi.
- 3) Konfrontasi.
- 4) Mogok.
- 5) Kekerasan fisik pada harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran).
- 6) Kekerasan fisik pada manusia (penculikan, pembunuhan).
- 7) Perang gerilya dan revolusi.

Arti non-konvensional terhadap partisipasi politik mencakup berbagai kegiatan yang cenderung melibatkan banyak orang dalam suatu bentuk kelompok massa dan kadang disertai dengan pelanggaran tertib hukum dan kekerasan. Partisipasi non-konvensional bisa diterima secara menyeluru tidak diikuti aksi pengrusakan atau kekerasan, seperti aksi protes dengan berpawai seraya membawa spanduk dan poster entang berbagai tuntutan, mengkoordinasikan aksi pemogokan dikalangan buruh atau menuntut kenaikan gaji, perbaikan kondisi kerja, dan peningkatan jaminan sosial.

Sebagaimana telah dikemukakan, kegiatan aksi protes sampai tingkat tertentu dapat bisa diterima secara menyeluru sebagai bentuk partisipasi politik alam masyarakat demokratis. Di Indonesia, aksi protes seringkali disertai dengan kekerasan dan pengrusakan yang justru tidak sesuai dengan hakekat demokrasi. Orang-orang yang memberikan suara dan berdemonstrasi tampaknya merupakan bentuk nyata partisipasi politik, tetapi sering kali tindakan mereka tidak didasarkan atas motivasi atau minat pribadi pelaku-pelakunya untuk

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Banyak personal yang berdemonstrasi ataupun membanjiri tempat pemungutan suara tersebut digerakkan oleh majikan mereka, yang apabila tidak menuruti akan mengancam pekerjaan yang berpengaruh pada masa depan mereka. Karena itu mereka tidak sadar bahwa tindakan yang dilakukan itu tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Milbrath dan Geol dalam Rahman (2007: 289) secara lebih spesifik mengidentifikasi empat bentuk partisipasi politik individual:

- a. Apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi proses politik.
 - b. Spektator yaitu orang yang pernah ikut memilih dalam pemilu.
 - c. Gladiator yaitu mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat.
 - d. Pengkritik yaitu orang- yang turut serta pada bentuk yang tidak konvensional.
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Angell dalam Ross (1967: 130) menyatakan, partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi, yakni: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal.

- a. Usia

Faktor usia ialah faktor yang mempengaruhi seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap,

condong lebih banyak berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada umumnya tempat perempuan adalah “di dapur” berarti bahwa peranan perempuan yang utama ialah mengurus rumah tangga, tetapi semakin lama nilai peran perempuan telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk berpartisipasi. Pendidikan dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang agar berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, mesti didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungannya akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Makin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka

rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar pada setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sebagian ahli dalam dunia politik mengutarakan faktor lain yang menyebabkan seseorang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik, sebagai berikut:

a. Status sosial dan ekonomi

Status sosial merupakan derajat seseorang pada masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sebaliknya status ekonomi ialah derajat seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga memiliki ketertarikan dan perhatian dalam politik (Surbakti, 1992).

b. Situasi

Ramlan Surbakti mengatakan, situasi politik juga dipengaruhi oleh suasana yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman (Surbakti, 1992).

c. Afiliasi politik orang tua

Afiliasi terkumpul pada suatu kelompok maupun kumpulan. Afiliasi politik bisa dikatakan seperti keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu maupun kelompok yang terkait pada paham-paham politik tersendiri. Afiliasi politik mendorong berkembangnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat guna memberikan hak politiknya secara bebas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan politik, misalnya ikut pada partai politik dalam

pemerintahan, turut serta pada bagian pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992).

d. Pengalaman berorganisasi

Organisasi ialah suatu system yang menata kehidupan masyarakat maupun dapat ditafsirkan seperti suatu perilaku yang terstruktur terhadap menentukan jabatan pada orang-orang tertentu guna melaksanakan fungsi tersendiri untuk pencapaian kepentingan bersama (Simangunsong, 2004).

e. Kesadaran politik

Kesadaran terhadap hak dan kewajiban selaku warga negara yang melekat terkait pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut ketertarikan dan kepedulian seseorang pada lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup (Hendrik, 2010).

f. Kepercayaan kepada pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah merupakan penilaian seseorang pada pemerintah apakah ia melihat pemerintah bisa dipercaya dan bisa dipengaruhi maupun tidak, baik pada penentuan kebijakan-kebijakan maupun implementasi pemerintahan (Hendrik, 2010).

g. Stimulan partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi Informal(Hendrik,2010)

Peran media dalam mensosialisasikan pemilu juga dianggap merupakan faktor penting supaya masyarakat bisa ikut serta dalam suatu pemilu. Dengan terinformasikannya pemilu secara luas terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan serta cara pemilihan serta informasi yang lain terkait dengan pemilu,

maka akan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat akan pemilu yang akan berdampak terhadap partisipasi itu sendiri. Tidak kalah penting dari sosialisasi dimedia, diskusi-diskusi tentang pemilu yang dilakukan secara ringan dan informalpun dianggap punya andil dalam mengakumulasi pengetahuan masyarakat tentang pemilu, yang semua itu pada gilirannya akan diharapkan berdampak positif terhadap tingkat partisipasi dalam pemilu.

B. Teori Peran

Peran adalah merupakan salah satu elemen pada sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum peran dapat didefinisikan menurut *Bauer* (2007:55) dalam *Haris* (2012:204) sebagai cara orang itu diharapkan berperilaku maupun bisa dikatakan pahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut.

Berdasarkan definisi di atas bisa disimpulkan bahwa peran adalah suatu konseptual yang melibatkan penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan atau bisa dikatakan suatu peran itu akan bergantung terhadap penekanan peran itu oleh para penilai dan pengamat.

Haris (2012:212) mengemukakan peran berarti laku, bertindak, peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan atau memegang kekuasaan. Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan menurut historis atau sejarah konsep peran adalah karakter yang disandang atau dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas. Sedangkan menurut ilmu sosial peran adalah suatu tujuan yang dibawakan seseorang saat

menduduki jabatan tertentu. Dari uraian di atas bisa dikatakan peran adalah sesuatu yang mempunyai memiliki pengaruh sesuai dengan fungsinya.

Selanjutnya peranan ialah aspek aktif pada kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya selaras dengan kedudukannya, jadi hal ini bermakna ia melaksanakan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertolak belakang satu sama lain. Tiap orang memiliki beragam peranan yang berasal dari tataan pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus bermakna bahwa peranan memastikan apa yang dilakukannya terhadap masyarakat kepadanya. Peranan lebih fokus menekankan atas fungsi, orientasi diri dan merupakan suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002: 268-269).

Menurut Soedjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dari kewajiban
3. Kepribadian sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang terdapat pada masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan tersebut ditata oleh norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Sebagai seseorang menempati suatu posisi pada masyarakat serta melaksanakan suatu peranan. Peranan terdiri tiga hal, yaitu:

1. Peranan melingkupi norma-norma yang dirangkaikan dengan posisi maupun tempat seseorang pada masyarakat. Peranan padaarti ini sebagai rangkaian aturan-aturan yang ada
2. Membina seseorang pada kehidupan kemasyarakatan peranan merupakan suatu rancangan tentang apa yang boleh dikerjakan oleh individu pada masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga bisa diartikan sebagai kepribadian individu yang penting terhadap struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002: 246).

Pembahasan perihal berbagai macam peranan yang terdapat pada individu-individu terhadap masyarakat penting bagi hal-hal yaitu:

1. Bahwa peranan-peranan tersendiri wajib dilaksanakan bila struktur masyarakat akan diteguhkan kesinambungannya
2. Peranan tersebut sekeanya disimpan pada individu-individu yang pada masyarakat dirasa bisa melaksanakan. Mereka mesti terdahulu di latih dan mempunyai hasrat untuk melakukannya
3. Pada masyarakat sering kala di lihat individu-individu yang tak bisa melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, sebab mungkin pengerjannya membutuhkan pengorbanan arti keinginan-keinginan pribadi yang terlalu banyak
4. Apabila semua orang dapat dan bisa menunaikan peranannya, belum tentu masyarakat mau membagikan keleluasaan yang sebanding, bahkan seringkali dijumpai betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut. (Soerjono Soekanto, 2002: 247).

Menton dalam Raho (2017:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran tersebut disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan begitu perangkat peran ialah kepadanan dari ikatan-ikatan berlandaskan peran yang dimiliki oleh orang sebab menempati status-status sosial khusus.

Wirutoma (1981:99-101) menyampaikan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang bersangkutan dengan pekerjaan, seseorang di minta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan pada peranan yang dimilikinya. Peranan didefinisikan menjadi himpunan keinginan-keinginan yang ditujukan kepada individu yang menduduki kedudukan sosial tertentu. Peranan dinyatakan oleh norma-norma pada masyarakat, artinya kini diharuskan untuk melaksanakan hal-hal yang diinginkan masyarakat pada pekerjaan kita, di dalam keluarga dan pada peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dinyatakan bahwa pada peranan ditemukan dua macam keinginan yaitu pertama, keinginan-keinginan pada masyarakat bagi pemegang peran maupun kewajiban-kewajiban pada pemegang peran, kedua keinginan-keinginan yang didapat oleh pemegang peran pada masyarakat maupun terhadap orang-orang yang berkaitan dengannya dalam melaksanakan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Sebagaimana pandangan David Berry, peranan-peranan bisa terlihat sebagai bagian pada struktur masyarakat sampai struktur masyarakat bisadilihat sebagai sistem peranan yang saling berhubungan.

C. Rumah Pintar Pemilu

1. Pengertian

Rumah pintar pemilu ialah sebuah ide/konsep pendidikan pemilih yang dilaksanakan melalui pemanfaatan ruang pada suatu bangunan maupun bangunan khusus guna menjalankan semua program-aktivitas project edukasi masyarakat. Di rumah pintar pemilu ini, satu sisi beragam program pendidikan pemilih dilaksanakan, dan di sisi yang lain bisa menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan.

Beragam sarana guna membagikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat terkait pentingnya pemilu dan demokrasi disiapkan di rumah pintar pemilu. Konsep rumah pintar pemilu sangat penting guna menjawab kepentingan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melaksanakan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan.

2. Tujuan program

Rumah pintar pemilu secara umum bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggara dan menjadi pusat informasi kepemiluan. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk mengarahkan masyarakat terhadap pentingnya pemilu dan demokrasi melalui cara mengenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi (para pemilih), meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi seluruh demokrasi (seluruh segmen), serta menerapkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen).

3. Sasaran/penerima manfaat pelayanan

Sasaran rumah pintar pemilu adalah masyarakat umum dan seluruh segmentasi yang terdapat dalam masyarakat.

4. Pendidikan Politik

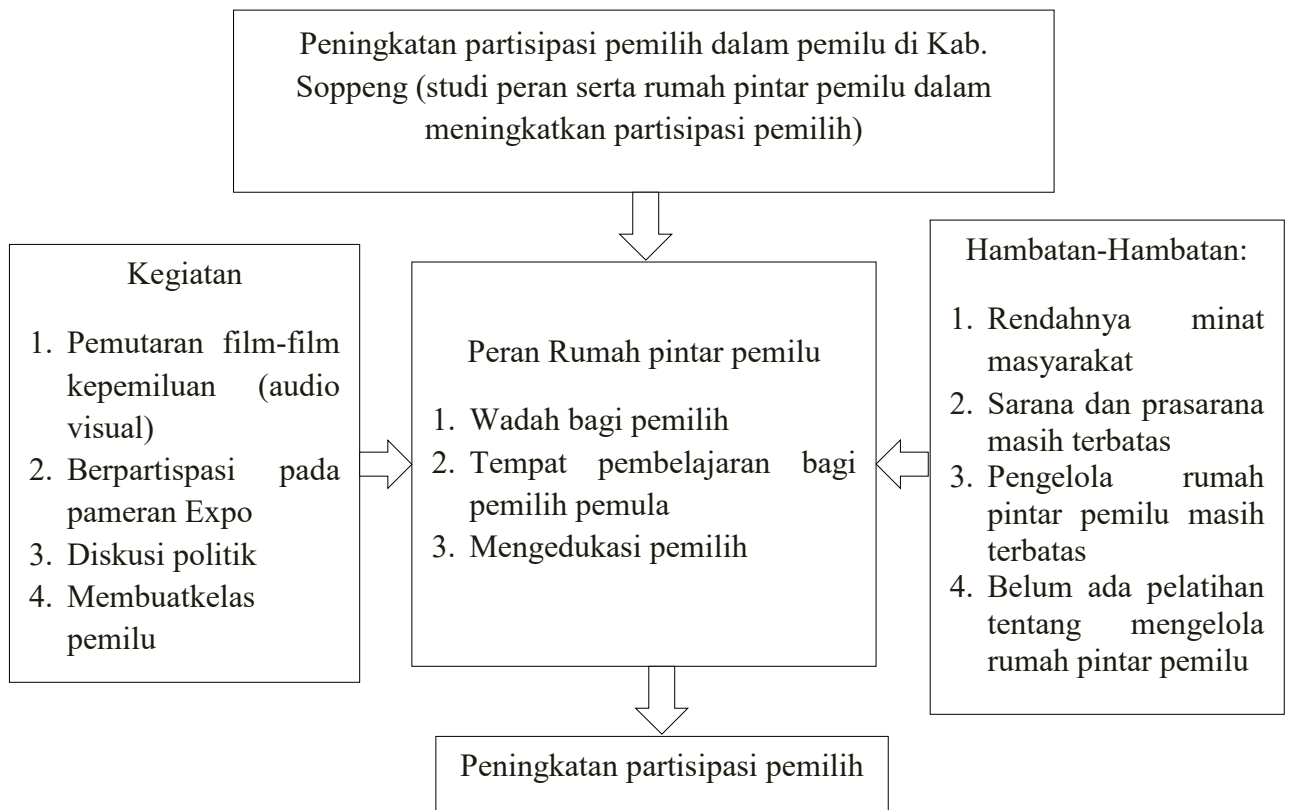
Pendidikan pemilih adalah proses transfer pengetahuan tentang pemilu tidak sekedar untuk menjawab pertanyaan apa dan bagaimana pemilu melainkan terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa harus ada pemilu. Alfian (1992), "Pendidikan politik merupakan upaya yang sadar guna merubah proses sosialisasi politik masyarakat sampai mereka mengetahui dan merasakan betul nilai-nilai yang terdapat pada suatu sistem politik yang sempurna yang akan dibangun.

Menurut Rusdi Kantaprawira (2004:55), pendidikan politik merupakan upaya meningkatkan pengetahuan rakyat supaya mereka mau ikut serta secara maksimal dalam pada politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat hendaknya bisa menunaikan tugas partisipasi. Selanjutnya untuk makna pendidikan politik bagi generasi muda dituangkan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik pada Generasi Pemuda yang menyatakan bahwa: fungsi pendidikan politik ialah memberikan arahan kepada generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya tujuan pendidikan politik lainnya adalah membuat generasi muda Indonesia yang sadar bagi kehidupan dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia seutuhnya.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa definisi konseptual yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan dengan jelas alur pemikiran peneliti yang berkaitan dengan *Sao Macca* di Kabupaten Soppeng (studi peran rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih). Kerangka pikir ini dimulai dengan mencari seperti apa peranan rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih, setelah itu kemudian jenis kegiatan apa yang terdapat pada rumah pintar pemilu, dan terakhir hambatan yang dihadapi program Rumah Pintar Pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk itu dalam penelitian ini perlu adanya suatu kerangka berpikir. Kerangka ini merupakan suatu narasi atau grafis yang berhubungan terhadap permasalahan penelitian. Dalam kerangka konseptual ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor kunci, yang nantinya akan berhubungan dengan faktor lainnya.

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah ini adalah mengetahui peran rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Soppeng dengan memahami jenis kegiatan apa yang diselenggarakan dalam rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Peran rumah pintar pemilu sebagai wadah bagi pemilih adalah kita berharap orang yang datang dirumah pintar pemilu ini menjadi paham, tahu, dan

mengetahui apa itu politik, demokrasi dan mendapatkan informasi tentang kepemiluan yang selalu dilaksanakan di Indonesia.

2. Tempat pembelajaran bagi pemilih pemula adalah salah satu tujuan dari rumah pintar pemilu. Rumah pintar pemilu bisa digunakan bagi para anak sekolah sebagai pemilih pemula untuk belajar berbagai hal tentang kepemiluan sehingga mereka dapat menanamkan pada diri mereka akan nilai-nilai demokrasi.

3. Mengedukasi pemilih adalah adanya rumah pintar pemilu diketahui oleh masyarakat luas akhirnya mereka dapat mendapatkan pengetahuan terkait berbagai informasi seputar pemilu dan tata caranya sehingga mereka menjadi pemilih yang cerdas dan efeknya lahir juga pemimpin yang cerdas.

4. Jenis kegiatan rumah pintar pemilu

a. Pemutaran film kepemiluan (audio visual) ialah salah satu agenda yang ada di rumah pintar pemilu, dimana para pengunjung yang berkunjung ke rumah pintar pemilu diputar film seputar tentang kepemiluan untuk menambah wawasan mereka.

b. Berpartisipasi pada pameran Expo ialah salah satu event luar yang dilakukan rumah pintar pemilu dimana pada pameran Expo yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, rumah pintar diangkut dan dijadikan stand-stand pameran guna mensosialisasikan keberadaan rumah pintar agar dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke rumah pintar pemilu.

c. Diskusi politik seperti memfasilitasi kegiatan diskusi pemilih, mengundang pemilih perempuan dan LSM.

- d. Membuat kelas pemilu dimana ketika ada kunjungan dari para anak sekolah sebagai pemilih pemula sebagai ajang sosialisasi KPU seputar kepemiluan.
5. Hambatan-hambatan rumah pintar pemilu
 - a. Masih redahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke rumah pintar pemilu.
 - b. Sarana dan prasarana masih terbatas seperti beberapa ruang dan beberapa perangkat sound system masih belum lengkap.
 - c. Pengelola rumah pintar pemilu masih terbatas dimana rumah pintar masih dikelola oleh anggota KPU.
 - d. Belum ada pelatihan tentang mengelola rumah pintar pemilu, selama ini pengelolaan rumah pintar hanya berdasar pada pedoman teknis rumah pintar pemilu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai dari tanggal 24 Februari sampai 24 April 2018 setelah seminar proposal pada tahun 2018. Penelitian dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng. Dasar penentuan lokasi tersebut karena rumah pintar pemilu ini bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng sebagai lembaga yang mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat pemilih agar turut berpartisipasi pada proses demokrasi.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif. Data kualitatif data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata tentang peran serta rumah pintar pemilu terhadap meningkatkan partisipasi pemilih.
2. Tipe penelitian ini ialah deskriptif yang berupaya menggambarkan secara umum tentang fakta yang berhubungan dengan peran rumah pintar pemilu terhadap meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Soppeng. Hal tersebut dilakukan dengan memahami gejala-gejala yang diteliti serta menganalisa apa yang didengar, mempelajari proses penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, memaknai dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut berdasarkan konteks ruang dan waktu, serta situasi secara alami.

C. Sumber Data

Sumber data ialah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi terkait data. Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut sumber data utama pada penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan aktivitas ialah sumber data dari lapangan dengan observasi atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Peran Rumah Pintar Pemilu terhadap meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Soppeng.
2. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber bacaan dan beragam macam sumber berbeda yang terdiri atas surat-surat pribadi, buku harian, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder dapat berupa artikel, buletin, publikasi dari beragam organisasi, hasil-hasil studi, hasil penelitian, mempelajari sejarah, dan lainnya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan tutor rumah pintar pemilu.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian kualitatif adalah sumber yang bisa memberikan informasi dipilih secara *purposive* berhubungan pada *purpose* atau maksu tersendiri. Oleh karena itu, informan yang akan diteliti akan ditentukan langsung oleh peneliti berkaitan dengan masalah dan tujuan peneliti.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa informan dalam penelitian ini dapat di lihat dari table berikut:

Tabel 3.1 Informan penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Murtina	MT	Kasubag: Teknis & Partisipasi Masyarakat	1 Orang
2	Darmawati Alimuddin	DA	Pengelola Teknis Rumah Pintar Pemilu	1 Orang
3	Marwis	MR	Devisi SDM & Partisipasi Masyarakat	1 Orang
4	Nurul Suciati	NC	Pemilih Pemula	1 Orang
5	Muh. Fadel	MF	Pemilih Pemula	1 Orang
6	Nur Aprilia	NA	Pemilih Pemula	1 Orang
7	Reski Wulandari	RW	Pemilih Pemula	1 Orang
Jumlah				7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian disamping memakai cara yang benar, juga dibutuhkan memilih teknik dan alat akumulasi data yang signifikan.

Metode yang digunakan untuk proses akumulasi data pada penelitian ini ialah dengan proses triangulasi, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan teknik melangsungkan peninjauan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan *Sao Macca* di Kabupaten Soppeng (studi peran rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih).

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka dalam suatu teknik *in depth interview* (wawancara mendalam), sehingga memungkinkan bagi sumber informasi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jawaban yang diberikannya terkait pada topik penelitian. Melalui teknik ini akan dapat diperoleh informasi yang seluas-luasnya untuk selanjutnya dilakukan analisis melengkapi fakta dan data yang tersedia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen bermakna barang tertulis, teknik dokumentasi merupakan cara akumulasi data dengan menuliskan data yang ada. Teknik dokumentasi ialah memeriksa data mengenai hal-hal maupun variable berupa catatan buku, surat, majalah prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Teknik atau studi dokumentasi merupakan teknik akumulasi data lewat peninggalan arsip-arsip dan termasuk buku-buku terkait pemikiran, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain terkait dengan masalah penelitian. Pada penelitian kualitatif metode akumulasi data yang mendasar sebab pembenaran

hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional lewat pemikiran, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dan hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang dikaji dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni model analisis interaktif yaitu tiga proses yang berlangsung secara interaktif.

1. Reduksi data, adalah proses memiliki mengutamakan, memudahkan, dan mengabstraksikan data dari beragam sumber data contohnya dari catatan lapangan, dokumentasi, arsip, dan sebagainya, sedangkan proses mempertegas, memperpendek membuang yang tidak perlu menentukan fokus dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat.
2. Penyajian data, ibarat menyusun data dan mempresentasikan dengan bagus supaya lebih mudah dipahami. Mempersentasikan bias bentuk paparan singkat, bagan, ikatan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi, proses penarik kesimpulan awal harus kuat dan terbuka, kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data berakhir (Sugiyono,2010:246).

G. Pengabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu dibutuhkan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam

penelitian ini dilihat dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Triangulasi pada pengujian kredibilitas ini dimaknai sebagai pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang dimaksud adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber. untuk menguji kredibilitas data dengan mencocokkan data yang didapat dari berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik dikerjakan melalui cara mencocokkan data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dicocokkan dengan pengamatan dan dokumen. Apabila melakukan teknik pengujian kredibilitas data itu memperoleh data yang berbeda-beda peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang berkaitan maupun yang lain guna menegaskan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Triangulasi waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data didapatkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum ada urusan bisa menghasilkan data yang lebih benar sehingga meyakinkan. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data bias dikerjakan melalui melakukan pembuktian dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji mendapatkan data yang berbeda maka dicoba

berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dikerjakan melalui cara mencocokkan hasil penelitian dari tim peneliti lain yang mendapat tugas melakukan observasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi geografis

Kabupaten Soppeng ialah suatu wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat pada antara 40 06' Lintang Selatan dan 40 32' Lintang Selatan dan antara 1190 47' 18" Bujur Timur dan 1200 06' 13" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Soppeng di penyusutan Sungai Walanae terdapat pada daratan dan perbukitan. Dengan luas daratan 700 km² terdapat diatas ketinggian pada umumnya kurang lebih 60 m pada permukaan laut. Perbukitan yang berluas 800 km² terletak di ketinggian pada umumnya 200 m pada permukaan laut. Ibukota Kabupaten Soppeng adalah Kota Watansoppeng berada di ketinggian 120 m pada permukaan laut. Gunung yang tertinggi yang ada di daerah Kabupaten Soppeng ialah gunung Nene Conang pada ketinggian 1.463 m. Puluhan sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Soppeng punya banyak potensi yang dapat menggenangi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai itu antara lain :Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai Walanna, sungai itu melewati Dusun Umpungeng, Dusun Langkemme, Dusun Cenranae, dusun Soga ke Sungai Walanna. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng meliputi Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan ragam penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan

2. Batas administratif

Kabupaten Soppeng ialah suatu daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan yang secara manajerial dikelompokkani menjadi 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga pada batas daerah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Barru

3. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum yaitu merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada di Indonesia. Seluruh aspek yang berhubungan terhadap pemilu sebagai tugas KPU dan bukan lembaga lainnya.

Penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu, terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tingkat provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk wilayah kabupaten/kota selaku satu kesatuan guna menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan wakil presiden secara langsung dari rakyat, demi untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang bermutu dibutuhkan

sebagai sarana guna menciptakan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibentuklah lembaga KPU.

Sesuai ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 terkait penyelenggara pemilihan umum ketentuan pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: pemilihan umum, lanjutnya diringkas pemilu, adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai lembaga Negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam Pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersjiwat nasional, konsisten dan bebasi. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu. Dalam pelaksanaannya, KPU memiliki kewenangan wilayah kerja yang mencakup semua wilayah Indonesia dan memiliki kedudukan yang bertingkat, mulai dari pusat hingga daerah. Di pusat biasa disingkat KPU, ditingkat provinsi dinamakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, ditingkat kabupaten/kotamadya disebut KPUD kabupaten/ kota. Pada tiap tingkat mempunyai kewenangan yang berbeda-beda.

Secara teknis penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh komisi pemilihan umum selaku institusi penyelenggara pemilihan umum yang dibentuk pemerintah. Selain KPU, keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan umum juga hendak memiliki dukungan oleh masyarakat sebagai faktor penting pada proses pemilihan.

a. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

1) Visi

Terbentuknya Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai kredibilitas, profesional, bebas, terbuka dan akuntabel, demi tercapainya demokrasi Indonesia yang bermutu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Misi

- a. Membentuk institusi penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai kemampuan, kredibilitas dan kapabilitas saat menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;

- d. Mengabdikan dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta meneguhkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Mengembangkan kesadaran politik rakyat guna ikut serta aktif pada Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

B. Gambaran Umum Rumah Pintar Pemilu

1. Sejarah Berdirinya Rumah Pintar Pemilu “*Sao Macca*”

KPU Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk didalamnya KPU Kabupaten Soppeng adalah salah satu provinsi yang dijadikan Pilot Project untuk mewujudkan suatu ide besar dari KPU Republik Indonesia yang bernama Rumah Pintar Pemilu. Istilah Rumah Pintar Pemilu untuk masing-masing daerah dapat diberi nama sesuai dengan kekhasan atau local content dari daerah itu sendiri. Untuk KPU Kabupaten Soppeng, Rumah Pintar Pemilu diberi nama “*Sao Macca*”.

Peresmian (launching) *Sao Macca* dilakukan tanggal 17 Maret 2017 oleh KPU Kabupaten Soppeng. Launching juga dihadiri oleh Bupati Soppeng, H. A. Kaswadi Razak, Kapolres Soppeng AKBP Dodied Prasetyo Aji, Wakil Ketua II DPRD Soppeng A. Mapparemma dan sejumlah pimpinan partai politik setempat.

Sao Macca adalah nama untuk Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Soppeng. Pemberian nama *Sao Macca* dilatar belakangi oleh filosofi bugis yang menggambarkan suatu ruang, rumah, atau museum yang mempunyai nilai edukasi dan ilmu tentang demokrasi dan kepemiluan.

Sao Macca terangkai dari dua kata yaitu “*Sao*” yang berarti rumah atau museum, “*Macca*” yang berarti pintar atau cerdas. Sehingga jika kata *Sao* dirangkaikan dengan kata *Macca* maka berarti museum yang menjadi episentrum aktifitas kepemiluan dan demokrasi.

Sao Macca sebagai identitas kearifan lokal berfungsi untuk menjadi spirit dalam menyosialisasikan dan memberi pendidikan pemilih agar masyarakat cerdas atau pintar dalam memilih pada pemilu dan pilkada.

Singkatnya, *Sao Macca* adalah symbol dari nilai-nilai yang membelajarkan penghuninya tentang arti sebuah kehidupan yang bermakna. Jadi dengan spirit *Sao Macca*, KPU Kabupaten Soppeng membuka diri seluas-luasnya dan mengundang semua stakeholder Pemilu dan masyarakat untuk berkumpul dan berdiskusi serta belajar tentang Politik, Pemilu, dan Demokrasi dalam arti khusus dan memecahkan berbagai persoalan yang ada pada praktik-praktik Demokrasi pada umumnya.

2. Sarana Prasarana Rumah Pintar Pemilu “*Sao Macca*”

Sarana rumah pintar pemilu “*Sao Macca*” terdiri dari ruangan yakni terdapat audio visual, ruang display/ peraga, dan ruang diskusi. Ruang audio visual terdapat sound sistem, kursi/tempat duduk, screen dan LCD. Ruang display/ alat peraga terdapat maket denah TPS, panel dinding, dapat berupa poster/ kaleidoskop/ banner/ alat peraga dinding lainnya.

3. Prinsip Layanan

Kejayaan pada mengembangkan dan menunaikan pelayanan tidak luput dari kapasitas pada pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima

ialah menguraikan pelayanan prima dengan memadankan faktor-faktor perilaku (attitude), perhatian (attention), tindakan (action), kemampuan (ability), penampilan (appearance), dan tanggung jawab (accountability)

a. Sikap (Attitude)

Sikap ialah pribadi atau perangai yang hendak ditonjolkan saat bertemu pengunjung, yang mencakup penampilan yang menarik dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai.

b. Perhatian (Attention)

Perhatian ialah kepedulian penuh kepada pengunjung, baik yang berhubungan pada perhatian akan kebutuhan dan keinginan pengunjung maupun pengertian atas saran dan kritiknya, yang mencakup memperhatikan dan paham secara sungguh-sungguh keinginan para pengunjung, mengamati dan menghargai perilaku para pengunjung dan mengerahkan perhatian penuh terhadap pengunjung.

c. Tindakan (Action)

Tindakan ialah beragam agenda nyata yang mesti dijalankan saat memberikan pelayanan terhadap pengunjung, yang meliputi mencatat setiap masukan dari pengunjung, mencatat kebutuhan para pengunjung dan menyatakan terima kasih dengan harapan pengunjung mau kembali.

d. Kemampuan (Ability)

Kemampuan ialah pengetahuan dan keahlian tersendiri yang mutlak dibutuhkan guna mendukung pelayanan, yang mencakup keahlian pada bidang kerja ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif,

mengembangkan motivasi dan meningkatkan public relation selaku komponen pada membina ikatan dengan para pengunjung.

e. Penampilan (Appearance)

Penampilan merupakan penampilan seseorang baik yang bersifat fisik atau non fisik, yang bisa menggambarkan kepercayaan diri dan keterjaminan dari pihak lain (pengunjung)

f. Tanggung jawab (Accountability)

Tanggung jawab adalah suatu sikap keperpihakan terhadap pengunjung sebagai suatu bentuk perhatian guna menghindar maupun mengurangi dan ketidakpuasan pengunjung.

4. Materi

a. Sejarah pemilu

Muatan sejarah pemilu minimal melayankan penyelenggaraan pemilu yang meliputi penyelenggara, peserta sistem dan hasil pemilu, materi sejarah pemilu bisa ditunjukkan pada wujud video, audio, panel dinding informasi dan komik.

b. Pentingnya pemilu dan demokrasi

Muatan terdapat majalah, tulisan, statement/ quotation (pernyataan yang inspiratif) terkait pentingnya pemilu dan demokrasi. Materi bisa diwujudkan pada wujud poster, kliping dan video.

c. Sistem pemilu

Muatan sistem pemilu terdiri pemaparan sistem pemilu (proporsional terbuka, distrik perwakilan atau campuran). Materi dapat diperlihatkan pada

wujud panel dinding informasi (analog/ digital), video/ film pendek/ animasi, booklet.

d. Tahapan pemilu

Konten tahapan pemilu mencakup tingkatan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan pemilihan gubernur, bupati/walikota, tahapan tersebut antara lain; pembentukan badan ad-hock, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih.

e. Peserta pemilu (pileg dan pilpres)

Konten meliputi peserta pemilu (partai politik dan perseorangan) pada pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; pemilu presiden dan wakil presiden; pemilu kota. Materi dapat diperlihatkan pada wujud panel dinding (analog/ digital), poster, video, miniatur bendera parpol.

f. Proses Pemilihan

Konten proses pemilihan mencakup sistem prosedur pemungutan suara dan penghitungan suara. Materi proses pemilihan bisa dilihat pada bentuk denah TPS yang merupakan poster, maket/diorama, panel dinding informasi, video, simulasi.

g. Profil penyelenggara pemilu

Konten sistem pemilu terdiri atas penjelasan sistem pemilu (proporsional terbuka, distrik perwakilan, atau campuran). Materi bisa diperlihatkan wujud panel dinding informasi (analog/digital), video/ film pendek/ animasi, booklet.

h. Uji pengetahuan pemilu

Konten uji pengetahuan pemilu terdiri atas pertanyaan mengenai kepemiluan dan demokrasi. Materi uji pengetahuan pemilu bisa diperlihatkan pada wujud digital-game, kuesioner, acak kata (puzzle), TTS pemilu, mewarnai, lomba cerdas cermat kepemiluan.

C. Data Hasil Pemilu Kab.Soppeng tahun 2015 dan 2018

Data pemilih tetap Kab. Soppeng tahun 2015 (pilkada) dan 2018 (pilgub) terdapat 8 kecamatan. Tiap kecamatan mempunyai puluhan TPS, itu di karenakan angka jumlah penduduk yang banyak. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah Pemilih Pilkada 2015

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Pilkada			
		Jml.	Jumlah pemilih		
		TPS	L	P	Total
1	Marioriawa	62	10.212	11.207	22.448
2	Donri-Donri	57	8.337	9.602	17.947
3	Ganra	25	3.926	4.813	8.739
4	Lilirilau	94	13.317	15.522	28.839
5	Liliriaja	60	9.750	11.297	21.047
6	Citta	19	2.846	3.421	6.267
7	Marioriwawo	94	17.431	19.306	21.419
8	Lalabata	92	16.255	17.848	34.103
Total		513	82.074	93.023	175.097

Tabel Jumlah Pemilih Pilgub 2018

No	Kecamatan	Daftar Pemilih Pilkada			
		Jml.	Jumlah pemilih		
		TPS	L	P	Total
1	Marioriawa	96	17.434	19.238	36.627
2	Donri-Donri	58	8.366	9.581	17.947
3	Ganra	25	3.941	4.809	8.750
4	Lilirilau	94	13.380	15.557	28.937
5	Liliriaja	63	9.810	11.303	21.113
6	Citta	19	2.945	3.492	6.437
7	Marioriwawo	62	10.200	11.151	21.351
8	Lalabata	96	16.223	17.826	34.049
Total		513	82.299	92.957	175.256

D. Peran Rumah Pintar Pemilu “Sao Macca” dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Soppeng.

Rumah Pintar Pemilu ialah sebuah gagasan pendidikan pemilih yang dilaksanakan melalui penggunaan ruang dari suatu bangunan maupun bangunan khusus guna menjalankan semua program-aktivitas project edukasi masyarakat.

Di rumah pintar pemilu ini, di satu sisi beragam program pendidikan pemilih dilaksanakan, dan di sisi lainnya sebagai wadah untuk komunitas pegiat pemilu membangun gerakan.

Berbagai sarana untuk membagikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat terkait pentingnya pemilu dan demokrasi disiapkan di rumah pintar pemilu. Pada fungsi yang lebih luas, konsep rumah pintar pemilu bisa digunakan menjadi serupa museum pemilu.

Konsep rumah pintar pemilu itu sangat penting guna menjawab keinginan pemilih dan masyarakat agar lahirnya sebuah sarana guna melaksanakan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah pintar pemilu diperuntukkan bisa menjadikan generasi bangsa yang bisa menerjemahkan nilai demokrasi sesuai khittahnya. Generasi inilah yang dapat bisa menjadi pemilih cerdas, juga bisa menjadi pemimpin yang bermutu dan menetapkan kebijakan yang memihak pada tujuan kejayaan masyarakat.

Peran rumah pintar pemilu sangat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, maka dari peran tersebut terdapat tiga komponen penting mengapa rumah pintar pemilu berpengaruh dalam peningkatan partisipasi pemilih.

1. Menjadi Wadah Bagi Pemilih

Peran rumah pintar pemilu sebagai wadah bagi pemilih adalah dimana kita berharap orang yang datang dirumah pintar pemilu ini menjadi paham, tahu apa itu politik, demokrasi dan mendapatkan informasi tentang kepemiluan dari dulu sampai sekarang.

Hasil wawancara dengan staf pengelola teknis rumah pintar pemilu “*Sao Macca*”, menyatakan bahwa:

“Keberadaan rumah pintar pemilu ini ialah program dari KPU RI, sasarannya pemilih pemula, forum atau organisasi yang menangani pemilihan, dan masyarakat umum. Rumah pintar pemilu ini sebagai wadah bagi masyarakat guna memperoleh informasi terkait pemilihan, otomatis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat”. (Hasil Wawancara, DA 20 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa rumah pintar pemilu ini sebagai wadah bagi pemilih pemula, forum atau organisasi yang menangani pemilihan dan masyarakat umum agar memperoleh informasi terkait pemilihan sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu.

Senada dengan hasil wawancara dengan devisi SDM dan partisipasi masyarakat, menyatakan bahwa:

“Dengan adanya rumah pintar pemilu ini bisa kita artikan sebagai tempat, wadah, di mana kita berharap orang yang datang di rumah pintar pemilu ini menjadi paham, tahu, mengerti apa itu politik, apa itu demokrasi, dan mendapatkan informasi pemilu dari awal sampai sekarang. Jadi sarana ini adalah yang disediakan oleh KPU bagi siapa saja, masyarakat luas, pelajar, kalangan kampus, datanglah ke rumah pintar pemilu”. (Hasil Wawancara MS, 21 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa adanya rumah pintar tersebut sebagai bentuk untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Selain itu, rumah pintar pemilu juga disediakan untuk masyarakat luas sehingga siapapun bisa berkunjung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi.

Senada yang diungkapkan informan selaku staf pengelola teknis rumah pintar pemilu, menyatakan bahwa:

“Dengan adanya rumah pintar pemilu ini, tentu partisipasi masyarakat akan meningkat. Dengan cara mereka melihat bagaimana tatacara dan mekanismenya proses pemilu. Dengan lebih tahu, maka mereka lebih

minat tertarik dalam partisipasi”.(Hasil Wawancara, DA 20 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa rumah pintar pemilu sangat penting bagi pengetahuan masyarakat. Dengan mereka lebih tahu tatacara dan mekanisme proses pemilu dapat menarik minat mereka untuk ikut berpartisipasi.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewancarai salah satu pemilih pemula yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi pemilih pemula sangat penting karena keberhasilan pemilu ada ditangan pemilih pemula. Jika pemilih pemula tidak tertarik dengan pemilu, maka dikhawatirkan pemilu di masa akan datang tidak akan berhasil dengan baik”. (Hasil Wawancara, NS 28 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di atas tentang menjadi wadah bagi pemilih pemula yaitu sosialisasi sangat berperan penting karena keberhasilan pemilu dimasa akan datang ditentukan oleh pemilih pemula.

2. Tempat Pembelajaran bagi pemilih pemula

Tempat pembelajaran bagi pemilih pemula adalah salah satu tujuan dari rumah pintar pemilu. Rumah pintar pemilu bisa digunakan bagi para anak sekolah untuk belajar barbagai hal tentang kepemiluan sehingga mereka dapat menanamkan pada diri mereka akan nilai-nilai demokrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewancarai devisi penanggungjawab teknis rumah pintar pemilu, menyatakan bahwa:

“Tempat pembelajaran bagi pemilih pemula merupakan salah satu program kerja yang diagendakan oleh rumah pintar pemilu sebagai wujud untuk membangun kesadaran politik dikalangan pelajar yang selama ini tidak disentuh sehingga melalui program ini dapat teraktualisasi dalam

partisipasinya untuk ambil bagian peserta demokrasi yang akan mendatang”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa rumah pintar sebagai wujud untuk membangun kesadaran politik dikalangan pemilih pemula dengan mengedepankan akal sehat dan hati nurani pada saat menggunakan hak pilihnya.

Hasil wawancara dengan devisi SDM dan partisipasi masyarakat, menyatakan bahwa:

“Salah satu tujuan rumah pintar pemilu yaitu bisa digunakan para anak sekolah untuk belajar segala hal tentang pemilu, apalagi disini ada banyak brosur-brosur yang akan disimpan di rumah pintar pemilu untuk proses pembelajaran masalah pemilu. Kami juga akan pasang data pemilu, seperti jumlah TPS pada pilkada lalu”.(Hasil Wawancara MS, 21 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa tujuan rumah pintar pemilu ini merupakan tempat pembelajaran bagi para anak sekolah untuk belajar segala hal tentang kepemiluan. Untuk proses pembelajaran banyak brosur yang disediakan dan data sepetutar kepemiluan pada pilkada lalu.

Senada dengan wawancara dengan staf pengelola rumah pintar pemilu menyatakan bahwa:

“Rumah pintar pemilu ini cukup strategis diterapkan kepada pemilih pemula, nantinya pemilih pemula yang berkunjung ke rumah pintar pemilu ini mereka dapat mengetahui dan memahami secara mendalam seputar kepemiluan. Adanya sarana sosialisasi di bidang audio visual, buku-buku dan lainnya yang tersedia memudahkan kita dalam mensosialisasikan pemilu kepada mereka”.(Hasil Wawancara, DA 20 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa secara strategis rumah pintar pemilu ini diterapkan kepada pemilih pemula untuk berkunjung ke rumah pintar pemilu agar mereka dapat mengetahui dan memahami secara mendalam seputar kepemiluan. Ketersediaan sarana sosialisasi membantu untuk mensosialisasikan pemilu kepada pemilih pemula.

Senada dengan yang diungkapkan diatas seorang pelajar selaku pemilih pemula mengatakan bahwa:

“Sebelumnya saya dan teman-teman yang lain kurang tahu mengenai pemilu namun setelah kami datang berkunjung kerumah pintar pemilu kami belajar seputar kepemiluan mulai dari sejarah pemilu. Saya pribadi banyak mendapatkan ilmu di rumah pintar pemilu ini, saya yang awalnya kurang tahu bagaimana tata cara proses pemilu kini lebih banyak tahu”. (Hasil wawancara, MF 28 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa para siswa yang datang ke rumah pintar pemilu, mereka belajar seputar kepemiluan sehingga mereka yang sebelumnya kurang tahu mengenai pemilu dan tata cara proses pemilu mereka lebih banyak tahu lagi setelah belajar di sana.

3. Megedukasi Pemilih

Mengedukasi pemilih adalah adanya rumah pintar pemilu diketahui oleh masyarakat luas akhirnya mereka dapat medapatkan pengetahuan terkait berbagai informasi seputar pemilu dan tata caranya sehingga mereka menjadi pemilih yang cerdas dan efeknya lahir juga pemimpin yang cerdas.

Hasil wawancara dengan devisi penanggungjawab teknis rumah pintar pemilu, menyatakan bahwa:

“Keberadaan rumah pintar pemilu ini sangat bermanfaat bagi pemilih tetap hingga pemilih baru, dimana disini mereka akan mendapat pengetahuan terkait berbagai informasi seputar pemilu dan tata caranya. Pengetahuan yang didapat dari rumah pintar pemilu ini, efeknya akan melahirkan pemilih cerdas. Dengan lahirnya pemilih cerdas dapat terpilih pemimpin cerdas. (Hasil Wawancara MT, 21 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa keberadaan rumah pintar pemilu memberikan manfaat bagi pemilih dengan mendapatkan pengetahuan terkait berbagai informasi seputar pemilu dan tata caranya sehingga mereka menjadi pemilih yang cerdas dan efeknya terpilih juga pemimpin yang cerdas.

Senada dengan hasil wawancara dengan staf pengelola teknis rumah pintar pemilu, menyatakan bahwa:

“Rumah pintar pemilu tujuan awalnya dibentuk adalah untuk menjadi, sarana pembelajaran politik bagi masyarakat, menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan, dan untuk meningkatkan partisipasi dengan adanya wadah yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat”. (Hasil Wawancara, DA 20 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya rumah pintar pemilu ini diketahui oleh masyarakat akhirnya mereka dapat mendapatkan ilmu seputar kepemiluan, otomatis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Senada dengan wawancara di atas seorang pelajar selaku pemilih pemula juga menyatakan bahwa:

“Setelah saya berkunjung ke rumah pintar pemilu ini, saya belajar banyak kepemiluan di sana. Banyaknya panel-panel dan buku-buku yang ada membuat saya dan teman-teman lebih banyak tau lagi tentang kepemiluan”. (Hasil wawancara, NS 28 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelajar yang datang belajar ke rumah pintar pemilu mendapatkan ilmu seputar kepemiluan dengan memanfaatkan panel-panel dan buku-buku yang ada sehingga wawasan mereka akan kepemiluan menjadi bertambah.

Senada dengan wawancara di atas seorang pelajar selaku pemilih pemula juga menambahkan bahwa:

“Saya dan teman-teman sangat mendukung dan mengapresiasi adanya rumah pintar pemilu ini, itu merupakan salah satu sosialisasi serta pendidikan pemilih agar kami lebih sadar untuk menggunakan hak pilih di pemilu”. (Hasil Wawancara, RW 28 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa adanya rumah pintar pemilu sangat diapresiasi oleh pemilih pemula yang merupakan salah satu bentuk sosialisasi agar mereka menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas mengenai peran menurut (Soerjono Soekanto, 2002) Peranan ialah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai akan kedudukannya, maka hal ini bermakna ia melaksanakan suatu peranan. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan dan saling bertolak belakang satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus bermakna bahwa perananan menetapkan apa yang dilakukannya terhadap masyarakat. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan selaku proses.

Peran disini adalah sesuatu yang memainkan *role*, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi

pengaruh pada lingkungan tersebut. Rumah pintar pemilu memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi peningkatan partisipasi dalam pemilu. Peran dan fungsi rumah pintar pemilu dapat diwujudkan dalam bentuk menjadi wadah bagi pemilih untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pemilu, menjadi tempat pembelajaran bagi pemilih pemula untuk belajar segala hal tentang pemilu sehingga dapat menanamkan kesadaran dan nilai-nilai berdemokrasi pada diri mereka, dan mengedukasi pemilih akan pentingnya pemilu dan berdemokrasi sehingga wawasan mereka akan kepemiluan menjadi bertambah, menjadi pemilih yang cerdas dan efeknya terpilih juga pemimpin yang cerdas.

E. Jenis Kegiatan Rumah Pintar Pemilu “Sao Macca”

1. Pemutaran Film-Film Kepemiluan

Pemutaran film kepemiluan (audio visual) merupakan salah satu kegiatan yang ada di rumah pintar pemilu, dimana para pengunjung yang berkunjung ke rumah pintar pemilu diputar film seputar tentang kepemiluan untuk menambah wawasan mereka.

Berkaitan hal di atas wawancara dengan penanggungjawab teknis rumah pintar pemilu, menyatakan bahwa:

“Dirumah pintar pemilu ini kegiatan dilakukan misalnya pemutaran film-film kepemiluan, pengunjung yang berkunjung diputar film-film seputar kepemiluan untuk menambah pengetahuan mereka akan pemilu. (Hasil Wawancara, MT 21 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan yang ada dirumah pintar pemilu yaitu pemutaran film-film kepemiluan kepada pegunjung untuk menambah pengetahuan mereka akan pemilu.

Hasil wawancara dengan devisi SDM dan partisipasi masyarakat, mengatakan bahwa:

“Menurut MR mengatakan bahwa pemilih pemula bisa memanfaatkan fasilitas rumah pintar pemilu ini untuk menambah pengetahuan tentang kepemiluan melalui pemutaran film-film kembali untuk mengingatkan kepada generasi muda bahwa pernah ada sejarah kita penghianatan oleh anak bangsa terhadap bangsa sendiri. Dengan cara ini pemilih pemula menambah pengetahuan tentang kepemiluan melalui pemutaran film-film ini.” (Hasil Wawancara MR, 23 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pemutaran film sangat bermanfaat bagi pemilih pemula untuk mengenal sejarah kepemiluan serta mengigatkan kepada generasi muda bahwa hak suara dalam pemilu sangat penting.

Senada wawancara denganstaf pengelola teknis rumah pintar pemilu, meyakini bahwa:

“Rumah pintar pemilu ini dilengkapi dengan audio visual yang diperuntukkan untuk pemutaran film pendek maupun animasi yang menggambarkan sejarah KPU/Pemilu, urgensi pemilu, tata cara pemungutan dan lain-lain”. (Hasil Wawancara, DA 20 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dirumah pintar pemilu dilengkapi dengan audio visual yang diperuntukkan untuk pemutaran film seputar pemilu bagi pengunjung untuk menambah wawasan mereka.

2. Berpartisipasi Pada Pameran Expo

Berpartisipasi pada pameran Expo merupakan salah satu kegiatan luar yang dilakukan rumah pintar pemilu dimana pada pameran Expo yang digelar oleh pemda Kabupaten Soppeng

Hasil wawancara dengan staf pengelola teknis rumah pintar pemilu, menyatakan bahwa:

“Dirumah pintar pemilu ini kita pernah mengadakan kegiatan luar yang dilakukan yaitu ikut berpartisipasi pada pameran exspo 2017, seolah-olah rumah pintar diangkat dijadikan stand-stand pameran guna mensosialisasikan adanya rumah pintar pemilu ini pada masyarakat”. (Hasil Wawancara, DA 20 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan dirumah pintar pemilu ini ikut berpartisipasi pada pameran expo guna memsosialisasikan adanya rumah pintar pemilu ini pada masyarakat.

3. Diskusi Politik

Diskusi politik merupakan salah satu kegiatan yang ada di rumah pintar pemilu.

Berkaitan hal diatas wawancara dengan staf pengelola teknis rumah pintar pemilu, menyatakan bahwa:

“Menurut DA mengatakan, kami menyediakan ruang diskusi untuk sarana diskusi masyarakat atau pemilih pemula yang ingin sharing informasi yang berhubungan dengan kepemiluan. Dengan adanya ruang diskusi politik ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat atau pemilih pemula dalam pemilu selanjutnya sehingga menjadi bagian pendidikan politik yang berkesinambungan serta dapat menyampaikan aspirasinya didalam ruang diskusi politik ini”. (Hasil Wawancara DA, 23 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa ruang diskusi politik sangat mempengaruhi masyarakat atau pemilih pemula untuk mendapatkan informasi pendidikan politik serta dapat menyampaikan aspirasinya.

Hasil wawancara dengan devisi penanggung jawab rumah pintar pemilu, menyatakan bahwa:

“diskusi politik termasuk kegiatan yang dilaksanakan di rumah pintar pemilu ini seperti memfasilitasi kegiatan pemilih, mengundang pemilih perempuan dan LSM” (Hasil Wawancara, MT 20 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa diskusi politik merupakan kegiatan yang dilaksanakan dirumah pintar pemilu dengan memfasilitasi kegiatan tersebut.

Senada dengan wawancara diatas salah satu perwakilan siswi SMA yang mengikuti kegiatan diskusi politik, menyatakan bahwa:

“iya saya mengikuti kegiatan diskusi politik yang dilakukan KPU dirumah pintar pemilu, saya sebagai pemilih pemula kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman untuk kami memahami apa saja tahapan pemilu dan bagaimana caranya, serta kami bisa memahami arti penting pemilihan umum”. (Hasil Wawancara, NA 28 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan dirumah pintar pemilu seperti diskusi politik diikuti oleh pelajar SMA sebagai pemilih pemula dan mereka merasakan manfaat dari kegiatan tersebut yakni mereka bisa memahami arti penting sebuah pemilihan.

Lanjut wawancara dengan RW selaku pemilih pemula, menyatakan bahwa:

“Menurut RW, dengan adanya diskusi politik atau kegiatan diskusi politik ini kami termotivasi untuk ikut aktif berpartisipasi dalam politik khususnya pemilu, menjadi pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab dalam keikutsertaannya mensukseskan pemilu menjadi agen pendidikan pemilih bagi saya sehingga harapan saya kualitas pemilu menjadi lebih baik kedepannya”. (Hasil Wawancara RW, 28 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan diskusi politik sangat memberikan motivasi untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu dengan menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan bertanggung jawab sehingga kualitas partisipasi pemilu menjadi lebih baik kedepannya.

4. Membuat Kelas Pemilu

Bagaimana mengantarkan calon pemilih menjadi cerdas, kritis dan bertanggung jawab, sebagai upaya untuk menjawab bagaimana partisipasi pemilih bisa bergeser dari partisipasi kuantitatif ke partisipasi kualitatif. Dibutuhkan model pendidikan pemilih. Salah satu kegiatan pendidikan pemilih yang saat ini dilakukan dirumah pintar pemilu adalah kelas pemilu.

Hasil wawancara dengan devisi penanggungjawab teknis rumah pintar pemilu, menyatakan bahwa:

“Kita coba memanfaatkan Rumah Pintar dengan membuat kelas pemilu untuk pelajar dan pemilih pemula untuk menyebarkan informasi tentang pemilu, serta menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas kecerdasan pemilih diantaranya memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilih, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi”. (Hasil Wawancara, MT 21 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kelas pemilu ini merupakan kegiatan yang diadakan untuk menginformasikan perihal pentingnya pendidikan pemilih dalam mewujudkan demokrasi berkualitas.

Senada dengan wawancara dengan devisi SDM dan partisipasi masyarakat, menyatakan bahwa:

“Kelas pemilu ini merupakan salah satu kegiatan yang akan terus dikembangkan di rumah pintar pemilu ini, tujuannya agar peserta mudah dalam pemahaman tentang arti pentingnya pelaksana pemilu sekaligus angka partisipasi bisa meningkat soalnya partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan kualitas pendaftaran pemilih”. ”.(Hasil Wawancara MS, 21 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kelas pemilu ini merupakan kegiatan yang akan dikembangkan terus di rumah pintar pemilu guna meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya pemilu serta agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pertanyaan tersebut senada diungkapkan oleh salah satu pemilu pemula, tersebut mengatakan:

“Melalui program kelas pemilu ini kami selaku siswa menekankan tentang pentingnya memahami proses pemilu sehingga ketika menyalurkan hak suara kami di tempat pengutan suara saya menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas. (Hasil Wawancara NA, 28 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kelas pemilu yang diadakan di rumah pintar pemilu menekankan kepada siswa akan pentingnya memahami proses pemilu sehingga bisa menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas mengenai kegiatan yang ada pada rumah pintar pemilu, untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui:

a. Audio Visual

Ruang untuk pemutaran film-film kepemiluan dan dokumentasi program kegiatan kepemiluan. Pada ruang audio visual tersedia layar, sound-sistem, tata cahaya, kursi penonton, projector, perangkat pemutar film.

b. Ruang Pameran (Display Alat Peraga Pemilu)

Yaitu ruang untuk menampilkan bahan/ alat peraga pemilu, seperti:

a) Maket atau diorama

Dalam rumah pintar pemilu merupakan bentuk visualisasi 3 dimensi yang menceritakan tentang proses atau peristiwa kepemiluan dan demokrasi, antara lain seperti proses pemungutan suara, denah TPS, peristiwa yang dianggap memiliki nilai sejarah terkait kepemiluan setempat, dsb.

b) Papan Informasi Dinding

Papan informasi ini berbentuk papan statis yang menampilkan bahan/ alat peraga pemilu seperti contoh poster, booklet, leaflet, brosur, dsb.

c. Ruang Diskusi

Ruang ini dirancang untuk melakukan audiensi atau pertemuan/ diskusi/ workshop/ seminar/ FGD tentang pemilu dan demokrasi. KPU dapat mengundang/ memfasilitasi para pegiat pemilu atau kelompok peduli pemilu/ masyarakat umum dari berbagai segmen, yang akan melahirkan banyak ide/ gagasan/ evaluasi untuk perbaikan proses pemilu dan demokrasi.

F. Hambatan-Hambatan Rumah Pintar Pemilu “Sao Macca”

Selama pelaksanaan program rumah pintar pemilu, kendala-kendala tentu masih ditemui. Walaupun menghadapi berbagai kendala, namun setidaknya hingga sekarang kendala-kendala tersebut masih bisa diatasi.

1. Rendahnya minat masyarakat untuk mengetahui adanya rumah pintar pemilu

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewancarai devisi penanggungjawab teknis rumah pintar pemilu, menyatakan bahwa:

“Kendala yang ada dirumah pintar pemilu ini yaitu minat masyarakat yang masih rendah untuk mengetahui adanya rumah pintar pemilu, Rumah pintar pemilu ini dibuat semacam museum di KPU, jadi semua yang ingin diketahui tentang kepemiluan dan seputar demokrasi di Indonesia ada disini. Sebenarnya rumah pintar pemilu ini terbuka untuk umum jadi tidak perlu KPU bersurat ke instansi atau lembaga supaya dapat berkunjung, tapi terserah dari lembaga tersebut misalnya universitas ada kegiatan pembelajaran tentang politik dan ingin melakukan studi banding atau benchmarking tentang KPU dia bisa berkunjung ke rumah pintar pemilu dan itu terbuka untuk umum termasuk masyarakat. Seperti yang telah dikatakan, minat masyarakat untuk datang sendiri tanpa ada undangan KPU masih kurang karena masyarakat menunggu untuk diundang, tidak ada inisiatif sendiri untuk datang tapi kalau diundang pasti datang”.(Hasil Wawancara, MT 21 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala yang ada dirumah pintar pemilu ini yaitu minat masyarakat yang masih rendah untuk mengetahui adanya rumah pintar ini dikarenakan masyarakat masih menunggu undangan dari KPU untuk berkunjung tidak ada inisiatif sendiri untuk datang tapi kalau diundang pasti datang.

Lanjut wawancara dengan devisi SDM dan partisipasi masyarakat, menyatakan bahwa:

“Kesadaran politik setiap masyarakat akan sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dikarenakan berbagai faktor yang akhirnya menghasilkan pemikiran masyarakat yang apatis sehingga mereka baru mau menggunakan hak pilihnya apabila mereka menerima uang dari para caleg sebaliknya apabila mereka tidak menerima apa-apa maka kelompok masyarakat ini enggan menggunakan hak pilihnya, mereka cenderung berpandangan “toh calon wakil rakyat itu-itu saja. Jadi, kalau calon itu terpilih, akan sama saja keadaan dengan sebelumnya.” (Hasil Wawancara MR, 23 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa uang masih menjadi penopang utama tingkat partisipasi politik masyarakat ini sehingga masyarakat cenderung bersikap apatis terhadap proses pemilu.

Wawancara dengan MF selaku pemilih pemula yang mengatakan bahwa:

“Banyak masyarakat atau pemilih pemula kurang paham tentang pemilu selama ini mereka beranggapan sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, rumah pintar pemilu diharapkan mampu menjadikan masyarakat kita cerdas dan melek pemilu”. (Hasil wawancara MF, 28 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian partisipasi masyarakat masih kurang paham tentang pemilu, mereka beranggapan pemilu bukan kewajiban melainkan urusan pemerintah.

2. Sarana dan prasarana masih terbatas

Berkaitan hal diatas peeliti mewancarai staf pengelola teknis rumah pintar pemilu, meyakini bahwa:

“Sarana dan prasarana masih belum lengkap karena masih belum ada punya ruangan khusus untuk simulasi, kemudian ruang untuk pemutaran film audio visual belum lengkap belum ada pengedap suara. (Hasil Wawancara, DA 20 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala yang ada dirumah pintar pemilu ini dari segi sarana dan prasaran masih terbatas yaitu masih ada ruangan yang belum ada dan perangkat sound system masih ada yang kurang.

Hasil wawancara dengan devisi penanggungjawab teknis rumah pintar pemilu, mengatakan bahwa:

“Fasilitas sangat menunjang terhadap pelaksanaan proses pembelajaran maka fasilitas atau ruang di rumah pintar perlu direhabilitasi karena ruang sangat berguna untuk kelancaran rumah pintar di masa yang akan datang. Tanpa fasilitas yang memadai rumah pintar ini tidak akan berjalan semaksimal mungkin, rumah pintar pemilu ini sangat berperan penting untuk melahirkan pemilih yang cerdas dan melek politik”. (Hasil Wawancara, MT 21 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa perlu diadakan rehabilitasi ruang untuk menunjang kelancaran rumah pintar pemilu di masa yang akan datang dan berjalan semaksimal mungkin.

3. Pengelola rumah pintar pemilu masih terbatas

Hasil wawancara dengan staf pengelola teknis rumah pintar pemilu menyatakan bahwa:

“Kalau ditanya masalah pengelola rumah pintar pemilu, jujur secara struktur pengurus itu tidak ada. Hanya saja rumah pintar pemilu ini ditangani sub bagian teknis yang mana sebagai penanggungjawab.” (Hasil Wawancara, DA 20 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa secara struktur pengurus di rumah pintar pemilu tidak ada melainkan rumah pintar pemilu ini dikelola bersama oleh anggota KPU khususnya sub bagian teknis yang mana sebagai penanggung jawab.

4. Belum ada pelatihan tentang mengelola rumah pintar pemilu

Hasil wawancara dengan dengan devisi penanggungjawab teknis rumah pintar pemilu, menyatakan bahwa:

“SDM pengelola informasi rumah pintar pemilu belum ada pelatihan khusus tentang mengelola rumah pintar pemilu itu sendiri. Hanya kita berdasarkan pedoman teknis saja, tidak pernah ada pelatihan tentang bagaimana mengelola rumah pintar pemilu itu sendiri jadi kita hanya berdasarkan teoritis saja petunjuk teknis yang ada”. (Hasil Wawancara, MT 21 Maret 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan rumah pintar pemilu ini hanya berdasarkan pedoman teknis yang ada dikarenakan SDM pengelola informasi rumah pintar pemilu ini belum ada pelatihan khusus yang diberikan terkait bagaimana mengelola rumah pintar pemilu itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan guna menangkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan *Sao Macca* di Kabupaten Soppeng (studi peran rumah pintar pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih), maka dapat disimpulkan bahwa:

Peran rumah pintar pemilu sangat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, maka dari peran tersebut terdapat tiga komponen mengapa rumah pintar pemilu berpengaruh dalam peningkatan partisipasi pemilih, antara lain: (a) Merupakan wadah bagi pemilih. (b) Tempat pembelajaran pemilih pemula. (c) Mengedukasi pemilih.

Jenis kegiatan yang terdapat dirumah pintar pemilu antara lain: (a) Diadakan pemutaran film-film kepemiluan (audio visual). (b) Ikut berpartisipasi pada pameran Expo 2017. (c) Diskusi politik, memfasilitasi kegiatan pemilih, mengundang pemilih perempuan dan LSM. (d) Membuat kelas pemilu.

Sedangkan hambatan-hambatan yang ada pada rumah pintar pemilih antara lain: (a) Rendahnya minat masyarakat untuk mengetahui adanya rumah pintar pemilu. (b) Sarana dan prasarana masih terbatas. (c) pengelola rumah pemilu masih terbatas. (d) Belum ada pelatihan khusus mengelola rumah pintar pemilu

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan dari hasil penelitian yang dilakukan selama ini sebagai berikut: (a) Keberadaan rumah pintar pemilu seharusnya lebih giat lagi disosialisasikan. (b) meningkatkan layanan dan program yang diberikan pada masyarakat. (c). Rumah pintar pemilu ini seharusnya mempunyai pengelola tersendiri, dan diberikan pelatihan tentang mengelola rumah pintar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1992. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Arsito, D.A. 2004. *Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif”*. Malang
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Davis, K, and J.W. Newstrom. 1996. *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi Ketujuh Jakarta: Erlangga
- Firmanzah, 2010, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Haris. 2012. *Peran dan Pemasaran Media Sosial Massa dan Komunikasi*. Bandung: PT. Pustaka Sinar Harapan
- Huntington, Samuel P. 1997. *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti Press
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatory Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press
- Kantraprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Moloeng, Ixey J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman.1992.*Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*.Terjemahan tjetjep roheni rohidi. Jakarta: UI-press
- Rahman .A. 2007.*Sistem Politik Indonesia*.Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip 2003.*Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press
- Simangunsong, Bonar. 2004. *Negara Demokrasi dan Berpolitik yang Profesional*.Jakarta. Gramedia
- Soetomo, 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Siswo Dkk, 2014, Journal, *Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai*.

- Soekanto. 2002. *Peranan*. Edisi Baru Rajawali Pers. Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2004. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta. Diktat
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Grasindo
- Tia Subekti. 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013*. Malang
- Wirutomo, Paulus. 1981. *Pokok –Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press
- <http://www.kpu.go.id>, (diakses pada tanggal 15 April 2018, Jam 09.00 wita).
- www.kpu.go.id/indeks.php/pages/detail/2016/864,(diakses pada tanggal 31 Maret, Jam 13.00 wita).

Daftar Riwayat Hidup



Penulis dengan skripsi yang berjudul *Sao Macca di Kabupeten Soppeng* (Studi Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih), Nama lengkap Andi Muhrani putri bungsu dari 7 bersaudara, anak dari pasangan Andi Chaeruddin dan Andi Pattappari lahir di Appanang, 8 Juni 1995.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar 67 Cangadi I, tamat pada tahun 2007 , di tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN I Liliraja dan tamat pada tahun 2010. Dan pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di SMAN I Liliraja dan tamat pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Univrsitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik pada tahun 2013.